



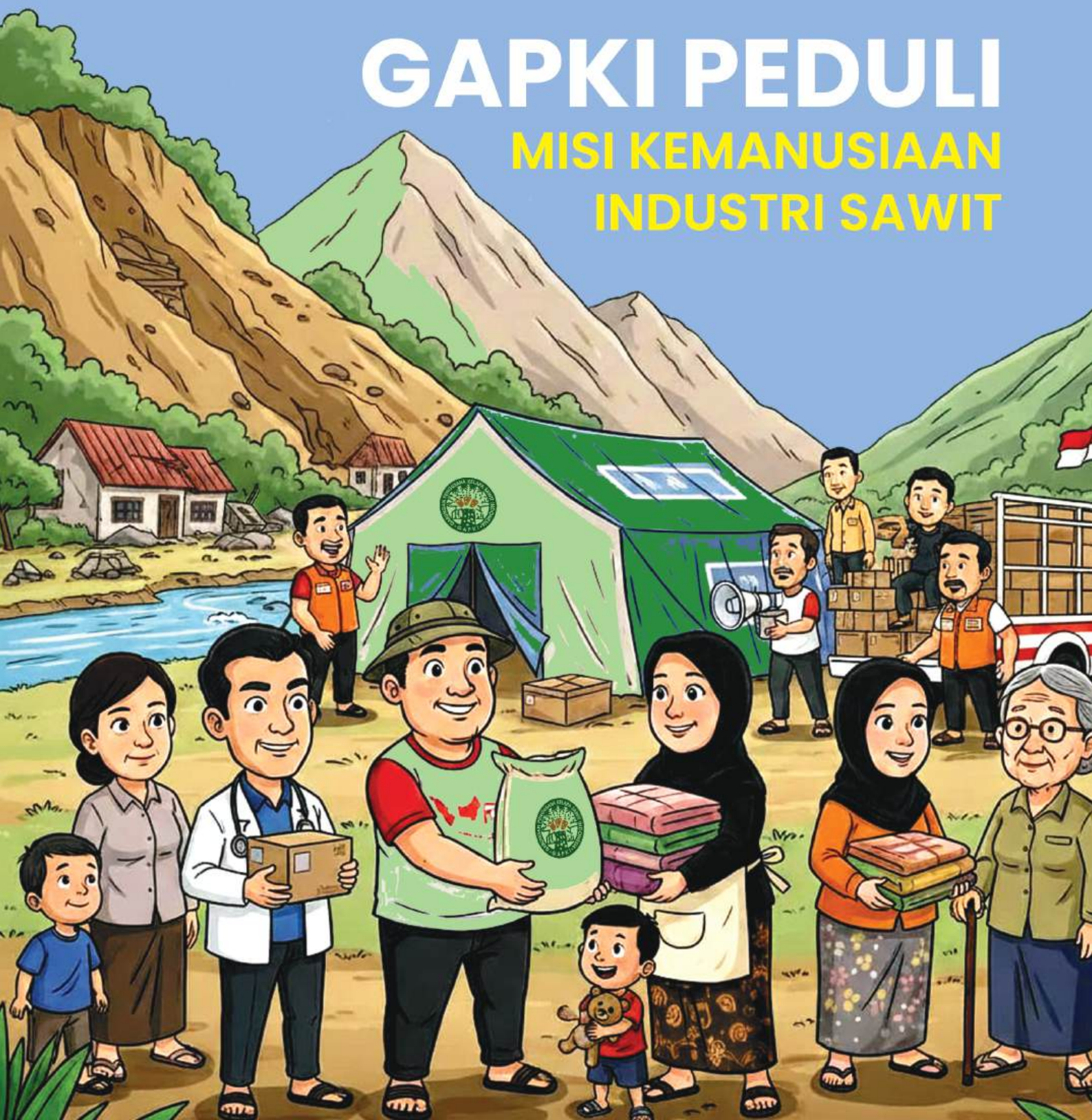
GAPKI

NEWS

GAPKI PEDULI

MISI KEMANUSIAAN

INDUSTRI SAWIT



Misi Kemanusiaan GAPKI

Pembaca yang budiman,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan karunia-Nya, *GAPKI News* edisi Februari 2026 dapat sampai ke tangan pembaca sesuai jadwal yang kita rencanakan.

Mengawali tahun 2026 yang penuh dinamika ini, *GAPKI News* berfokus pada bencana alam yang terjadi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai tema utama edisi Februari 2026 ini. Topik ini sangat penting untuk menunjukkan kepedulian GAPKI sekaligus respon cepat dalam membantu korban. Kita bersyukur bantuan kemanusiaan dari anggota GAPKI dapat disalurkan dengan baik tidak lama setelah bencana terjadi.

GAPKI bergabung dengan misi kemanusiaan yang dikoordinasi oleh Kementerian Pertanian. Kebijakan ini merupakan langkah tepat supaya bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan para korban. Selain misi kemanusiaan, edisi Februari 2026 juga membahas topik lain yang berhubungan langsung dengan keberlangsungan industri sawit antara lain revisi peraturan DHE, pembebasan bea masuk minyak sawit ke Amerika, dan komitmen GAPKI dalam menjamin pasokan untuk pasar Pakistan.

Terkait dengan revisi peraturan DHE, GAPKI menilai diperlukan sikap bijak dan mendorong pemerintah mengkaji tantangan industri sawit terkait dengan aturan terbaru. Apalagi pada saat bersama, industri sawit menghadapi tantangan lain seperti produktivitas yang stagnan, konsumsi yang meningkat, hingga kebijakan terkait biodiesel. Semua peristiwa ini menjadi dinamika yang perlu kita sikapi dengan bijak.

Harapan kita, semoga sajian *GAPKI News* edisi Februari 2026 ini menjadi awal yang positif bagi industri sawit dalam menjalani tahun 2026. Terima kasih dan selamat membaca. ■

**Salam,
Redaksi GAPKI News**

GAPKI News

Media Komunikasi dan
Informasi Anggota GAPKI

PENERBIT
GAPKI Pusat

PEMBINA
Eddy Martono
Sany Anthony
Susanto Yang
Satrija B. Wibawa
M. Hadi Sugeng
Mona Surya

PENGARAH
Mukti Sardjono

TIM AHLI
Para Ketua Bidang
Pengurus Pusat GAPKI

PENANGGUNG JAWAB
Bandung Sahari

Dewan Redaksi
Yudha Negara Nyoman
Indah Permata Soegyarto
Mochamad Husni
Dyah Laras Wulandari
Susan Sri Rahayu
Eko Tamba

ALAMAT
Kantor GAPKI Pusat
Sudirman Park Blok B-18
Jalan KH Mas Mansur Kav. 35
Jakarta 10220

(+62) 21-5794-3871
gapki@gapki.id | gapkipusat@
yahoo.com



GAPKI Jajaki Eksplorasi Material Genetik Sawit Zambia.....	15
--	----

Salam Redaksi.....	2
Daftar Isi.....	3
Memperkuat Komitmen HAM di Industri Sawit.....	4
Amerika Bebaskan Bea Masuk Impor Minyak Sawit.....	5
GAPKI Peduli, Misi kemanusiaan Industri Sawit.....	6,7
Kampar Siaga Bencana, GAPKI Riau Serahkan Bantuan.....	8
Komitmen GAPKI Jaga Stabilitas Pasokan CPO untuk Pakista.....	9
Dubes Pakistan Undang GAPKI Diskusi Tentang Sawit.....	10
GAPKI Perkuat Jejaring Perdagangan dengan Pakistan.....	11
Revisi Peraturan DHE dan Tantangan Industri Sawit.....	12,13
Memperkuat Perlindungan Pekerja Perempuan.....	14



Tanzania Pelajari Pengembangan Sawit dari Indonesia.....	16
--	----



GAPKI Promosikan Tempat Kerja Tanpa Kekerasan dan Pelecehan.....	17
--	----

Meningkatkan Kapasitas K3 di Sektor Sawit.....	18
GAPKI-UPN Yogyakarta Sepakati Kolaborasi Penelitian.....	19
GAPKI Kalimantan Tengah Terima Anugerah Peduli Pers.....	20
Partisipasi GAPKI Dalam Panen Raya Program Swasembada Pangan.....	21
Sumatera Selatan Tindak Tegas Pencurian TBS.....	22

MEMPERKUAT KOMITMEN HAM DI INDUSTRI SAWIT

Setiap peserta wajib menyusun rencana aksi beserta linimasa implementasi.

Praktik bisnis berkelanjutan yang menghormati hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu harapan pasar global, investor maupun pemerintah. Penguatan aspek HAM dalam industri sawit semakin penting karena industri sawit menjadi andalan ekspor *non-migas* Indonesia. Untuk itu, GAPKI bersama ILO memperkuat kolaborasi melalui pelatihan *Responsible Business Conduct* (RBC) dan *Human Rights Due Diligence* (HRDD) bagi perusahaan anggota GAPKI di Jakarta pada 28-29 Januari 2026.

“Penguatan praktik kerja yang selaras dengan prinsip HAM adalah bagian dari manajemen risiko perusahaan sekaligus fondasi untuk menjaga kepercayaan pasar dan daya saing di perdagangan global,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam sambutan pelatihan. Isu ketenagakerjaan dan HAM tidak hanya sekadar kepatuhan pada regulasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlanjutan usaha dan daya saing industri.

Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas perusahaan anggota GAPKI dalam menerapkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab serta uji tuntas hak asasi manusia, khususnya pada dimensi ketenagakerjaan di sektor kelapa sawit. Upaya ini makin relevan seiring meningkatnya ekspektasi pasar global, investor, dan

pemerintah terhadap praktik bisnis yang menghormati hak pekerja dan hak asasi manusia di seluruh rantai pasok.

Pelatihan ini menyajikan beragam topik terkait ketenagakerjaan dan HAM yang disampaikan oleh Ketua Bidang Pengembangan SDM GAPKI Sumarjono Saragih dan pemateri dari ILO. Beberapa topik itu antara lain pengenalan instrumen internasional tentang perilaku bisnis yang bertanggung jawab, seperti Deklarasi ILO tentang Perusahaan Multinasional dan Konvensi Fundamental ILO, serta tahapan praktis Uji Tuntas HAM.

Selain itu, peserta pelatihan juga dibekali dengan alat bantu praktis dan studi kasus untuk mendukung implementasi RBC dan HRDD di perusahaan dan rantai pasoknya. RBC adalah prinsip bisnis yang mendorong perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab, kemudian mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi. Fokusnya pada transparansi, akuntabilitas, dan etika bisnis perusahaan, termasuk di subsektor perkebunan kelapa sawit.

Pelatihan ini tidak hanya memberi materi, namun setiap peserta wajib menyusun rencana aksi beserta linimasa implementasi yang berfokus pada dimensi ketenagakerjaan. GAPKI dan ILO akan memilih sedikitnya 10 perusahaan mengikuti program pendampingan lanjutan selama enam bulan guna memastikan rencana aksi



itu dapat dijalankan secara efektif.

Pelatihan ini bagian dari kolaborasi berkelanjutan GAPKI dan ILO yang berlangsung sejak 2017, serta didukung oleh proyek *Realizing Trade Gains Free from Gender Discrimination and Child Labour* (RealGains). Dengan kegiatan ini diharapkan anggota GAPKI semakin siap menghadapi tuntutan HRDD yang berkembang dalam perdagangan dan rantai pasok global sekaligus memperkuat komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. ■



AMERIKA BEBASKAN BEA MASUK IMPOR MINYAK SAWIT

*Konsumsi minyak sawit
Amerika naik 20 kali lipat
dalam dua dekade.*



Kabar menggembirakan itu datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelang berakhirnya tahun 2025. Tim Negosiasi yang dipimpin oleh Airlangga bersama USTR Jamieson Greer membawa kabar positif bagi industri sawit dalam negeri. Komoditas andalan ekspor Indonesia ini mendapatkan pengecualian bea masuk impor 19% untuk produk yang masuk ke Amerika Serikat. Artinya, sawit mendapatkan bea masuk impor 0% seperti yang diharapkan banyak kalangan.

Pembebasan bea masuk 0% ini tidak hanya berlaku untuk kelapa sawit. Kakao termasuk di dalamnya karena dikategorikan sumber daya alam berbasis *tropical* seperti halnya sawit. "Jadi semua yang sumber daya alam berbasis *tropical* (bebas tarif 19%). Kalau produk manufaktur bukan sumber daya alam," kata Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta pada 26 Desember 2026.

Pembebasan bea masuk sawit ini tertuang dalam instruksi Presiden AS Donald Trump atau *Executive Orders* (EO) yang diterbitkan oleh Gedung Putih. *Executive Orders* merupakan pernyataan perintah Presiden Donald Trump untuk memberikan pembebasan tarif atas daftar komoditas impor tertentu yang diberikan kepada suatu negara. Prosesnya harus melalui perundingan bilateral dengan negara yang menginginkan pembebasan bea masuk. Kebijakan ini merupakan bagian dari *Agreement on Reciprocal Tariff* (ART) setelah Amerika menerbitkan perintah eksekutif terkait tarif resiprokal pada April 2025.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menegaskan pembebasan bea masuk akan berdampak positif terhadap

ekspor minyak sawit ke Amerika. Ekspor CPO Indonesia ke Amerika pada 2023 sudah mencapai 2,5 juta ton lalu turun menjadi 2,3 juta ton pada 2024. "Kalau kembali ke 0% ada kemungkinan dua tahun ke depan akan tembus tiga juta ton," katanya. Selama ini, Amerika Serikat termasuk dalam lima besar negara tujuan ekspor CPO Indonesia. Nilai eksportnya terus meningkat dalam dua dekade terakhir.

Pada tahun 2001 konsumsi minyak sawit Amerika Serikat masih sekitar 215 ribu ton yang meningkat menjadi 1,4 juta ton pada tahun 2018. Lonjakan tinggi konsumsi minyak sawit dapat dilihat dari impor CPO Indonesia. Impor minyak sawit tertinggi terjadi pada tahun 2023 yang menyentuh 2,5 juta ton. Peningkatan konsumsi minyak sawit Amerika Serikat sudah melonjak 20 kali lipat dalam dua dekade terakhir. Pangsa pasar minyak sawit juga meningkat dari semula 2% menjadi 10% dalam total konsumsi minyak nabati.

Minyak nabati, terutama minyak sawit dari Indonesia dibutuhkan oleh Amerika Serikat untuk kepentingan industri pangan, oleokimia, dan biodiesel. ■

GAPKI PEDULI, MISI KEMANUSIAAN INDUSTRI SAWIT



Jatah hujan dalam satu bulan turun serentak selama tiga hari tanpa henti.

Bencana ekologi berupa banjir bandang dan tanah longsor menimpa tiga provinsi sekaligus: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 hingga Desember 2025. Anomali siklon tropis yang sering muncul menembus zona tropis di wilayah Indonesia dan bergerak melintasi daratan memicu curah hujan tinggi. BMKG menyebutkan hujan pada 25, 26, dan 27 November 2025 mencapai 411 mm/ hari atau mencakup volume hujan selama satu. Artinya jatah hujan satu bulan turun serentak selama tiga hari tanpa henti.

Guyuran air hujan dalam jumlah besar

dan masif membuat tanah tidak mampu menyerap dengan cepat. Akibatnya air hujan meluber ke daratan, terutama daratan yang lebih rendah. Ribuan warga menjadi korban, ribuan rumah hanyut, serta area pertanian dan perkebunan terendam banjir.

Musibah yang menimpa warga tiga provinsi ini mendorong GAPKI bergerak cepat untuk memberikan bantuan melalui program GAPKI Peduli. Berkolaborasi bersama Kementerian Pertanian, GAPKI menghimpun donasi untuk meringankan beban masyarakat terdampak bencana. Hanya dalam waktu satu jam, Rp 75,85 miliar donasi terkumpul dalam berbagai bentuk

bantuan mulai bahan kebutuhan pokok, perlengkapan darurat dan uang yang dibelanjakan untuk membantu korban. Hasil dari gotong royong banyak pihak dan dunia usaha, termasuk GAPKI, yang dikoordinir oleh Kementan terkumpul bantuan yang diangkut 207 truk untuk dikirim ke lokasi bencana pada 4 Desember 2025..

“Solidaritas bukanlah seremoni, melainkan panggilan moral bangsa,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ketika melepas ratusan truk pengangkut bantuan kemanusiaan. Bantuan ini dikirimkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bantuan langsung dari GAPKI berupa makanan dan minuman siap



konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana.

"Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara kita yang terkena bencana," kata Sekretaris Jenderal GAPKI M. Hadi Sugeng yang mengawal pengiriman bantuan. Mobilisasi bantuan ini sebagai bentuk komitmen GAPKI di bidang kemanusiaan. GAPKI menyerukan pengurus GAPKI Cabang, terutama di daerah terdampak bencana untuk bergerak bersama membantu meringankan beban warga.

Beberapa respon langsung dilakukan GAPKI cabang di daerah terdampak bencana antara lain mendata korban, mendirikan posko dan tenda darurat, menerjunkan tim lapangan, serta mengirimkan bantuan langsung ke titik terdampak. GAPKI Cabang Sumatera Utara mengirim 10 ton beras yang diserahkan oleh Ketua GAPKI Sumut Timbas Prasad Ginting kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara. Bantuan hasil patungan anggota GAPKI Sumut ini akan terus berlangsung selama tanggap darurat bencana.

Bantuan dari GAPKI Cabang Sumut tahap berikutnya berfokus untuk warga terdampak di Kabupaten Langkat. Bantuan sandang pangan ini dikerjasamakan dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Utara. Bantuan berupa beras, mie instan, gula, teh, dan bantuan makanan lainnya. Distribusi bantuan dilakukan oleh PMI Kabupaten Langkat yang terjun langsung di titik terdampak bencana. "Kami akan terus melakukan yang kami bisa untuk membantu saudara yang terdampak," kata Timbas Prasad Ginting.

GAPKI Cabang Aceh juga melakukan hal serupa dengan berfokus pada bantuan sembako, air bersih, dan tandon air. "Ini yang paling dibutuhkan warga terdampak bencana," kata Ketua GAPKI Aceh Azra Husaini. Sebelum menentukan jenis bantuan, GAPKI Aceh melakukan survei lapangan secara langsung. Di posko-posko pengungsian, GAPKI Aceh menyalurkan air bersih menggunakan truk tangki lengkap tandon air yang digunakan bersama oleh warga.



Bantuan diserahkan kepada Wakil Bupati Aceh Tamiang, daerah paling terdampak di Aceh.

Azra Husaini mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk mendukung masyarakat, khususnya pada masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Kolaborasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait serta pihak swasta, GAPKI berharap penanganan bencana berjalan dengan baik sehingga warga terdampak bisa kembali bangkit untuk beraktivitas kembali.

Selain GAPKI Sumut dan Aceh, GAPKI Cabang Sumatera Barat juga menyerahkan bantuan senilai Rp 150 juta untuk korban banjir di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam dan Kota Padang. "Bantuan langsung kita antar kepada korban," kata Ketua GAPKI Sumatera Barat, Bambang Wiguritno pada 13 Januari 2026. Bantuan berupa beras, minyak goreng, makanan siap saji, tikar, selimut dan lainnya.

Bantuan lain yang diberikan GAPKI Sumbang adalah bantuan BPJS untuk tenaga kerja rentan masalah kecelakaan sebesar Rp 15,12 juta untuk 300 orang. Sedangkan bantuan bagi siswa SMK Lubuk Basung yang

menjadi korban longsor dan banjir Rp 19 juta untuk 17 orang. "BPJS tenaga kerja rentan kecelakaan ini berlaku untuk waktu tiga bulan," katanya. Bantuan ini diharapkan membuat tenaga kerja rentan kecelakaan merasa aman nyaman selama bekerja dan para siswa tetap dapat bersekolah tanpa terganggu urusan biaya.

Langkah cepat GAPKI dalam merespon bencana mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Kementerian Pertanian memberikan Piagam Apresiasi secara langsung kepada GAPKI di Markas Komando Lintas Laut Militer, Pelabuhan Tanjung Priok, 12 Desember 2025. "Apresiasi ini sebagai bentuk terima kasih atas kepedulian GAPKI terhadap korban bencana alam," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Dalam satu jam donasi yang terkumpul mencapai Rp 75,85 miliar yang dihimpun dari berbagai kalangan dunia usaha termasuk dari GAPKI. Bantuan ini sangat bermanfaat. Apalagi bantuan ini diberikan ketika lokasi bencana masih sulit ditembus di mana ribuan warga terjebak di daerah yang terisolasi akibat jembatan yang putus dan jalanan yang tidak bisa dilalui akibat longsor. ■

KAMPAR SIAGA BENCANA, GAPKI RIAU SERAHKAN BANTUAN

Pemkab Kampar telah mendirikan Pos Siaga Bencana sebagai pusat koordinasi.

GAPKI Cabang Riau berinisiatif mengirimkan bantuan setelah Pemerintah Kabupaten Kampar menetapkan status Siaga Darurat Bencana terhitung sejak 10 Desember 2025 hingga 30 Januari 2026. Status ini ditetapkan setelah mengamati hujan ekstrem selama beberapa hari serta terjadinya banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. “Kita harus bergerak cepat untuk melakukan mitigasi dan sosialisasi,” kata Bupati Kampar Ahmad Yuzar pada 10 Desember 2025.

Penetapan status Siaga Darurat Bencana ini mendorong GAPKI Cabang Riau melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menyelaraskan bantuan hingga kebutuhan daerah untuk mengantisipasi bencana. Selain audiensi pada 18 Desember 2025, GAPKI Riau menyerahkan bantuan kemanusiaan yang diserahkan secara simbolis kepada Bupati Kampar untuk persiapan menghadapi bencana dan perlindungan warga. Bantuan ini berasal dari perusahaan anggota GAPKI di Riau dan perusahaan lainnya.



Penyerahan bantuan dilakukan di Pos Siaga Bencana Dusun Kampung Godang, Desa Pulau Lawas, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Bantuan berupa makanan siap santap, sembako, dan bantuan kebutuhan masyarakat. Untuk mitigasi bencana, Pemkab Kampar telah mendirikan Pos Siaga Bencana sebagai pusat koordinasi dan respons cepat terhadap kondisi darurat, khususnya bagi masyarakat di wilayah rawan bencana.

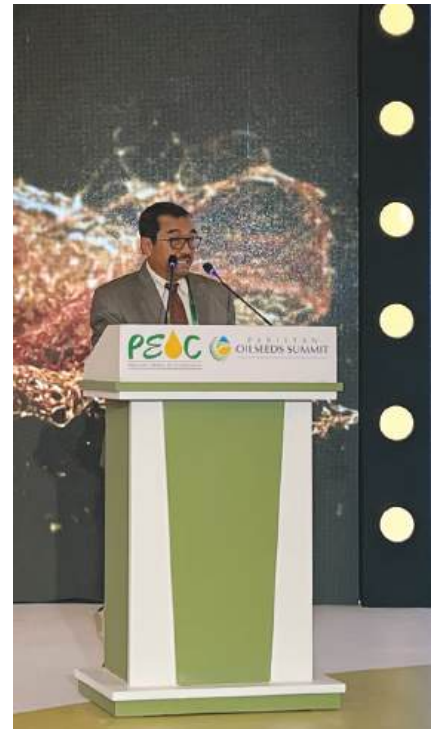
Untuk memantau perkembangan situasi, Posko Siaga terus melakukan patrol air bersama tim gabungan TNI, Polri, BPBD, serta unsur pemerintah daerah. Pemantauan difokuskan pada elevasi air Pembangkit Listrik Tenaga Air Koto Panjang. Peringatan antisipasi bencana juga disosialisasikan kepada masyarakat yang berada di sepanjang aliran Sungai Kampar agar tetap waspada. Apalagi peningkatan debit air akan berdampak terhadap keramba milik masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan mereka.

“Pemerintah Kabupaten Kampar menyambut baik inisiatif dan kepedulian GAPKI Riau dalam mitigasi kondisi darurat,” kata Ahmad Yuzar kepada pengurus GAPKI Riau. Bantuan GAPKI Riau merupakan semangat bagi para relawan yang siap diterjunkan ketika bencana benar-benar terjadi. “Kami berharap kolaborasi dengan GAPKI menjadi inspirasi bagi perusahaan lainnya,” katanya.

Dalam audiensi dan penyerahan bantuan ini, perwakilan GAPKI Riau menegaskan GAPKI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam mendukung kesiapsiagaan pemerintah memitigasi bencana. Penyerahan bantuan kemanusiaan ini bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan. “GAPKI berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah, terutama dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah di masa-masa rawan bencana,” kata perwakilan GAPKI Riau. ■



KOMITMEN GAPKI JAGA STABILITAS PASOKAN CPO UNTUK PAKISTAN



Kebutuhan minyak nabati Pakistan pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 5 juta ton.

Sebagai negara importir CPO Indonesia terbesar ketiga di dunia, Pakistan memiliki posisi strategis. Apalagi ekspor minyak sawit Indonesia ke Pakistan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Yang tertinggi terjadi pada 2024 dengan total ekspor minyak sawit Indonesia ke Pakistan mencapai 3 juta ton. GAPKI berkomitmen untuk menjaga stabilitas pasokannya ke Pakistan. Komitmen ini disampaikan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam *The 8th Pakistan Edible Oil Conference (PEOC) 2026* di Karachi pada 9-10 Januari 2026.

Stabilitas pasokan CPO menjadi topik hangat karena Indonesia akan meningkatkan program B40 menjadi B50 di tahun 2026 yang meningkatkan konsumsi domestik Indonesia di tengah stagnansi produksi sawit. Padahal, sekitar 70% kebutuhan minyak nabati Pakistan berasal dari minyak sawit Indonesia. Dalam konferensi ini, GAPKI memaparkan sejumlah strategi untuk memenuhi konsumsi domestik dan menjaga ekspor agar terjadi keseimbangan yang menjadi solusi bersama.

Dalam konferensi ini, Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI M. Fadhil Hasan mempresentasikan kondisi industri sawit terkini yang berjudul *Indonesia Palm Oil Industry: Trade Opportunity and Market Uncertainty*. Fadhil Hasan menjelaskan perubahan kebijakan B40 menjadi B50 serta implikasinya terhadap industri, Termasuk, simulasi volume ekspor CPO apabila bauran bahan bakar fosil minyak nabati sebanyak 40% seperti sekarang, 45% hingga 50%.

Sebagai negara importir CPO Indonesia terbesar ketiga di dunia, Pakistan ingin mendapat gambaran komprehensif industri sawit nasional. Bagi Pakistan hal ini sangat penting karena konsumsi minyak nabati mereka sangat tinggi. Tidak heran kalau volume impor minyak sawitnya mendekati India dan China. "Pakistan bukan sekadar pasar penting, namun juga strategis bagi perdagangan CPO dunia, khususnya di Asia Selatan," kata Fadhil Hasan.

Selain GAPKI, presentasi industri sawit global juga dipaparkan oleh Izzana Salleh, Sekretaris Jenderal CPOPC yang berfokus pada keamanan

pangan dan stabilitas pasar CPO di Pakistan.

Negara di Asia Selatan ini sangat penting bagi perdagangan minyak sawit karena konsumsi minyak nabati terus meningkat. Dalam proyeksi CPOPC, kebutuhan minyak nabati Pakistan pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 5 juta ton.

Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti yang menghadiri konferensi ini menegaskan pentingnya Pakistan sebagai pasar utama bagi Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan perdagangan yang lebih seimbang dengan membuka peluang yang lebih luas bagi produk unggulan Pakistan. Karena itu, Indonesia dan Pakistan sepakat membentuk Komisi Perdagangan Bersama Indonesia–Pakistan.

Selain itu, GAPKI juga menandatangani MoU kerja sama dengan Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA) dan Pakistan Vegetable Manufacturers Association (PVMA) untuk mengamankan rantai pasok serta menjaga stabilitas harga minyak sawit di kedua negara. Hal ini menegaskan posisi Indonesia tidak hanya eksportir, tetapi juga mitra strategis jangka panjang bagi ketahanan pangan dan industri Pakistan. ■

DUBES PAKISTAN UNDANG GAPKI DISKUSI TENTANG SAWIT

***Dubes Zahid ingin
menggali kendala dan
hambatan perdagangan
antara Indonesia dan
Pakistan.***

Dubes Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri mengajak GAPKI bertukar pikiran tentang komoditas sawit tidak lama setelah bertugas sebagai Dubes untuk Indonesia sejak lima bulan lalu. Dalam diskusi di kantor Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta, 17 November 2025, GAPKI diwakili oleh Ketua Umum Eddy Martono, Kabid Luar Negeri M. Fadhil Hasan, dan Kabid Pengembangan SDM Sumarjono Saragih. Dubes Zahid didampingi oleh Menteri Perdagangan dan Investasi Pakistan Muhammad Naseem Rasheed.



Dalam pertemuan ini Dubes Zahid ingin menggali kendala dan hambatan perdagangan antara Indonesia dan Pakistan, terutama komoditas minyak sawit. Sebagai salah satu negara importir terbesar minyak sawit dari Indonesia, Pakistan ingin importasi ke negaranya tidak mengalami hambatan. Indonesia adalah lima besar mitra dagang Pakistan dimana sebanyak 90% kebutuhan minyak sawit Pakistan dipenuhi dari minyak sawit Indonesia.

Minyak sawit berperan signifikan bagi masyarakat Pakistan untuk menjamin *food security* masyarakatnya. Minyak sawit bukan sekadar komoditas, namun bagian penting kehidupan sehari-hari warga Pakistan. Karena itu, Dubes Zahid ingin mendengar langsung dari GAPKI tentang pasokan minyak sawit ke negaranya. Pakistan menaruh perhatian besar berkaitan dengan rencana pemerintah Indonesia meningkatkan bauran minyak sawit untuk bahan bakar solar dalam program B50 mulai tahun 2026 ini.

Dalam pertemuan ini GAPKI juga menjelaskan keunggulan minyak sawit dibandingkan minyak nabati lain seperti minyak bunga matahari, minyak kedelai, hingga minyak kanola. Keunggulan minyak sawit bukan hanya dari produktivitas per hektar, namun juga aspek kesehatannya. Dari aspek harga, minyak sawit juga unggul karena harganya kompetitif yang selama ini menjadi kelebihan dibandingkan minyak nabati lainnya.

Kepada Dubes Pakistan, GAPKI juga menjelaskan bahwa minyak sawit termasuk komoditas yang mendapatkan pembebasan bea masuk ke Amerika Serikat. Penetapan tarif resiprok yang ditetapkan oleh Amerika di bawah Presiden Donald Trump tidak berlaku untuk minyak sawit sehingga menjadi angin segar bagi industri sawit Indonesia. Berbekal pembebasan bea masuk ini, ekspor minyak sawit dari Indonesia ke Amerika diperkirakan meningkat ke angka tiga juta ton tahun ini.

Kerjasama perdagangan Indonesia dan Pakistan selama ini berjalan dengan baik di mana kebutuhan minyak sawit Pakistan selalu terpenuhi. Indonesia juga aktif berpartisipasi pada setiap konferensi minyak nabati Pakistan, salah satunya *Pakistan Edible Oil Conference* kedelapan yang akan digelar pada 9-10 Januari 2026 di Karachi. Kehadiran Indonesia untuk memperkuat kerjasama dengan para pelaku industri dan pemangku kepentingan Pakistan di bidang minyak nabati dan berbagai sektor potensial lainnya. ■



GAPKI PERKUAT JEJARING PERDAGANGAN DENGAN PAKISTAN

Perdagangan minyak sawit menjadi bagian signifikan dalam perdagangan bilateral ini.

Hubungan dagang Indonesia dan Pakistan sudah terjalin sejak beberapa dekade silam. Bahkan, Karachi sebagai gerbang ekonomi Pakistan merupakan mitra alami Indonesia dalam memperluas jangkauan pasar ke Asia Selatan. Komoditas andalannya adalah minyak sawit. Jejaring inilah yang diperkuat melalui *The Indonesia Palm Oil Networking Reception* yang diadakan oleh Konjen RI di Karachi dan GAPKI di Karachi pada 9 Januari 2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri, Dubes Indonesia untuk Pakistan Chandra W. Sukotjo, Konjen RI di Karachi, Mudzakir, dan Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. *Chief Guest Federal Minister for Commerce of Pakistan*, Jam Kamal Khan juga hadir di acara ini.

"Pertemuan ini wadah untuk memperkuat kepercayaan, menjajaki peluang baru menuju kerja sama ekonomi yang lebih terstruktur dan berorientasi masa depan," kata Wamendag Dyah Roro Esti.

Dalam acara ini Wamendag Dyah Roro dan Menteri Perdagangan Pakistan menandatangani MoU pembentukan *Joint Trade Commission (JTC) Indonesia-Pakistan*. Hal ini adalah tindak lanjut kunjungan Presiden Prabowo pada Desember 2025 yang menyepakati peningkatan

I-P PTA (*Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement*) menuju *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* tahun 2027. Perdagangan minyak sawit menjadi bagian signifikan dalam perdagangan bilateral ini.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menjelaskan GAPKI berperan sebagai mitra strategis bagi pemerintah dalam memperkuat hubungan bilateral. Salah satu tugas GAPKI menyediakan informasi yang akurat mengenai praktik industri kelapa sawit Indonesia.

"Indonesia tetap menjadi pemasok minyak sawit yang stabil bagi pasar Pakistan," katanya. Pakistan adalah salah satu importir minyak sawit terbesar di dunia.

Menurut Eddy Martono, GAPKI bersama para mitra di Pakistan akan memfasilitasi kontrak dagang langsung antara produsen Indonesia dan pembeli Pakistan. Tujuannya menjamin ketersediaan pasokan minyak sawit bagi kebutuhan pangan dan industri di Pakistan serta mendorong kolaborasi teknis di bidang *refinery* dan pengolahan minyak sawit.

Di samping itu, GAPKI juga berperan sebagai wadah para pelaku usaha kelapa sawit untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Indonesia khususnya



Kementerian Perdagangan dalam perumusan kebijakan ekspor yang mendukung daya saing produk Indonesia di pasar global, termasuk Pakistan.

"GAPKI penggerak utama sektor swasta yang akan memastikan komitmen politik pemerintah dapat diterjemahkan ke dalam transaksi nyata serta kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan," katanya. ■



REVISI PERATURAN DHE DAN TANTANGAN INDUSTRI SAWIT

GAPKI berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan penempatan DHE.

Surplus perdagangan merupakan instrumen penting dalam memperkuat cadangan devisa dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar, tingkat inflasi, dan daya tahan terhadap gejolak ekonomi. Surplus perdagangan tahun 2024 yang kurang tercermin dalam cadangan devisa membuat pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Revisi penempatan DHE SDA berlaku 1 Januari 2026 setelah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. “Sudah *clear*, sudah disetujui Presiden,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada 9 Januari 2026.

Peraturan tentang penempatan DHE SDA sudah berjalan selama bulan pada tahun 2025. Namun, dampak surplus perdagangan terhadap cadangan devisa belum optimal. “Kurang nendang,” kata Menkeu Purbaya. Cadangan devisa Indonesia tahun 2024 adalah USD 155,7 miliar. Di akhir Desember 2025 cadangan devisa naik menjadi USD 156,5 miliar atau naik hanya USD 0,8 miliar. Padahal surplus perdagangan tahun 2025 sebesar USD 38,5 miliar seharusnya berdampak signifikan pada peningkatan cadangan devisa negara. Revisi aturan ditargetkan memperkuat cadangan devisa dan dampak surplus perdagangan lebih terasa.

Dalam aturan terbaru, ada beberapa ketentuan krusial yang menjadi perhatian kalangan dunia usaha, termasuk industri kelapa sawit. Penempatan



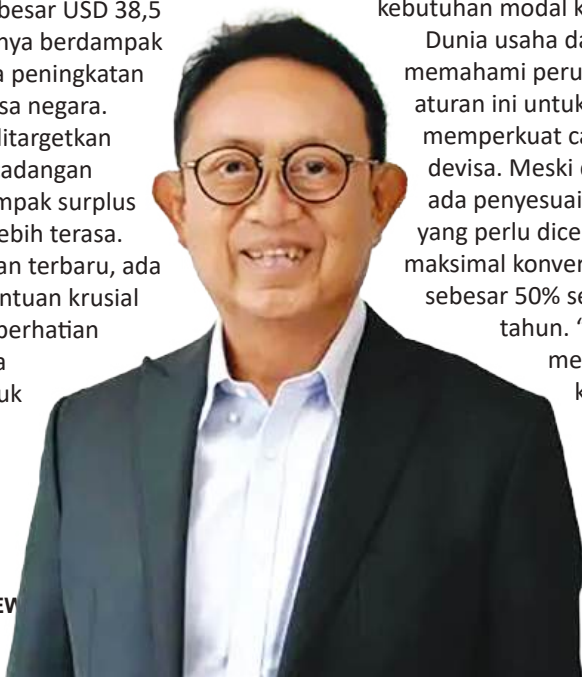
DHE valas para eksportir hanya diperbolehkan di bank-bank milik negara atau Himbara. Sebelumnya, tidak disebutkan secara spesifik harus di bank-bank milik negara. Konversi DHE valas ke Rupiah dibatasi 50% yang diikuti perluasan penggunaan valas untuk pengadaan barang dan jasa tidak terbatas hanya pada barang yang tidak dapat diproduksi domestik, dan kebutuhan modal kerja.

Dunia usaha dapat memahami perubahan aturan ini untuk memperkuat cadangan devisa. Meski demikian, ada penyesuaian aturan yang perlu dicermati yakni maksimal konversi valas sebesar 50% selama satu tahun. “Itu sangat memberatkan,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy

Martono. Komoditas ekspor lain yang berbasis sumber daya alam yakni industri kakao juga mencatat penyesuaian yang perlu dicermati bersama.

Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia Soetanto Abdoellah mengatakan dengan peraturan baru ini, dunia usaha harus memiliki modal lebih besar untuk menjaga likuiditas dan arus kas perusahaan. Modal tambahan ini untuk biaya operasional antara lain pemupukan yang tidak boleh terlambat. “Kebutuhan modal untuk ekspor juga lebih besar,” katanya.

Menurut Eddy Martono, biaya operasional industri kelapa sawit mulai dari perawatan kebun hingga pengolahan 50% lebih dari keseluruhan biaya. Apabila konversi valas maksimal 50% perusahaan menghadapi kesulitan likuiditas. Kondisi ini dikhawatirkan memicu efek domino yang berdampak pada sawit secara keseluruhan, terutama daya saing



minyak sawit.

Selama ini pengawasan penempatan DHE melalui SiMoDIS (Sistem Informasi Monitoring Devisa terintegrasi Seketika) Bank Indonesia sudah berjalan efektif. Setiap kali Pelaporan Pabean Ekspor (PPE) atau Pelaporan Ekspor Barang (PEB) terbit, Bank Indonesia memonitor langsung melalui SiMoDIS. Kalau tiga bulan dana tidak masuk, diberikan surat peringatan. "Bahkan ekspor bisa dihentikan," katanya. Dengan sistem ini, DHE sudah masuk dan tetap berada di dalam negeri meskipun ditempatkan di bank non-Himbara. GAPKI tidak keberatan DHE di simpan di bank-bank Himbara dalam peraturan terbaru.

Tingkat Kepatuhan GAPKI Sangat Baik

Selama pemberlakuan aturan DHE tahun 2024, tingkat kepatuhan anggota GAPKI sangat baik seperti tercermin di SiMoDIS Bank Indonesia. Apalagi mayoritas eksportir besar minyak sawit adalah anggota GAPKI. "Kami dapat memonitor dan sejauh ini tidak ada masalah," kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. Deputi Senior Gubernur BI Destry Damayanti juga menegaskan tingkat kepatuhan eksportir terhadap PP No. 8 Tahun 2025 pada tahun 2025 mencapai 95% atau sangat tinggi.

Dengan aturan terbaru DHE, tentu

saja dunia usaha harus berusaha keras agar operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik. Pinjaman bank adalah salah satu solusi selama DHE ditahan.

"Tapi, pinjaman bank pasti berbunga," katanya. Semua akan berujung pada satu hal yakni biaya operasional perusahaan meningkat.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono memberikan ilustrasi sederhana tentang peningkatan biaya operasional. Satu perusahaan mengekspor 10 ribu ton minyak sawit setiap bulan dengan harga rata-rata USD 1.000/ metrik ton. Biaya tambahan sebesar Rp 9,9 miliar per tahun menjadi tanggungan perusahaan karena selisih bunga 1% dari skema pembiayaan back to back. "Ini penambahan biaya nyata," katanya.

Layaknya mata rantai produksi barang, ketika biaya satu item naik atau ada biaya tambahan, biaya bahan baku dikurangi atau harga jual dinaikkan. Biaya tambahan ini berpengaruh pada harga TBS petani yang selama ini sudah dikenakan pungutan ekspor sekitar Rp 250/ kg TBS. Begitu juga dengan harga jual yang bisa dinaikkan. Namun, harga CPO ditentukan oleh harga internasional sehingga ruang untuk menaikkan harga CPO sangat terbatas.

Eddy Martono mengatakan dunia

usaha berupaya meningkatkan daya saing produk, salah satunya dengan harga yang kompetitif. Ketika harga CPO naik, daya saingnya akan menurun. Kalau harga minyak sawit Indonesia lebih mahal, importir akan mengganti dengan minyak nabati lainnya. Peristiwa ini sudah dialami oleh industri sawit di tahun 2024 ketika CPO menjadi yang termahal di dunia. "Apa yang terjadi? Ekspor kita turun," katanya.

Biaya tambahan yang timbul akibat kekurangan likuiditas berpotensi menurunkan produksi sawit akibat pengurangan biaya operasional, terutama pada pos pemupukan. Komponen ini paling mudah dikurangi karena besar. Masalahnya, pemupukan yang tidak maksimal akan berefek pada penurunan produktivitas tanaman. Kondisi ini dikhawatirkan bisa menambah masalah karena produktivitas sawit stagnan dan lima tahun terakhir.

Dengan berbagai risiko yang sangat mungkin timbul dari aturan terbaru ini, GAPKI berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan penahanan DHE. Terutama pada ketentuan kewajiban menahan 50% DHE selama setahun.

"Memperkuat devisa itu baik. Namun jangan sampai memberatkan industri dan menurunkan daya saing," katanya. ■



MEMPERKUAT PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN

“Anak-anak yang ikut ke kebun sawit dianggap bekerja, padahal mereka bermain.”



Perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak menjadi prioritas industri sawit nasional yang diwujudkan dalam beragam aksi konkret. Selain pemenuhan hak pekerja perempuan, penyediaan fasilitas seperti ruang laktasi dan layanan kesehatan juga dilakukan. Begitu juga dengan penghapusan pekerja anak. “Ini dukungan industri sawit mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Marja Yulianto, Komp. Pekerja Perempuan dan Perlindungan Anak GAPKI dalam diskusi di Kementerian Pertanian, 2 Desember 2025.

Diskusi yang digelar oleh Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) ini mengangkat tema *Industri Sawit Peduli: Melindungi Perempuan, Menghapus Pekerja Anak Untuk Keberlanjutan*. Selain perwakilan GAPKI, narasumber antara lain Direktur Sawit dan Aneka Palma Kementan Baginda Siagian, peneliti BRIN Delima Hasri Azahari, dan Kepala Pengembangan Program Solidaritas Indonesia Edy Dwi Hartono.

Menurut Marja, 758 perusahaan anggota GAPKI telah menjalankan program perlindungan pekerja, terutama pekerja perempuan melalui Pelatihan K3, fasilitas APD, Posyandu,

PAUD, ruang laktasi, hingga Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan. Berbagai pelatihan tentang hubungan industrial juga diberikan. Upah laki-laki dan perempuan sama. Perbedaan terjadi karena pilihan jam kerja. “Tidak benar upah pekerja perempuan lebih rendah,” katanya.

Komitmen perlindungan pekerja perempuan, GAPKI juga terus memperjuangkan penghapusan pekerja anak di sektor sawit. Tuduhan industri sawit mempekerjakan anak-anak tidak benar dan tidak lebih dari kampanye negatif. Faktanya, anak-anak pekerja sawit sepulang sekolah mengisi waktu luangnya di kebun sawit

tempat orangtuanya bekerja pada jam kerja. Pemandangan ini yang diambil gambarnya oleh sekelompok aktivis dengan narasi pekerja anak di sektor sawit. “Ambil fotonya diam-diam lalu dinarasikan pekerja anak di industri sawit,” katanya.

Marja menegaskan kampanye hitam tidak berdasarkan fakta lapangan ini merugikan industri sawit, terutama anggota GAPKI yang 69% telah tersertifikasi ISPO. Pengakuan tata kelola sawit berkelanjutan ini tidak mungkin diterbitkan kalau perusahaan sawit mempekerjakan anak-anak. “Tuduhan tidak benar itu sudah pasti merugikan kita,” katanya.

Hal senada diungkapkan peneliti utama BRIN, Delima Hasri Azahari. Temuan tentang pekerja anak ini sering berawal dari kesimpulan yang keliru oleh pihak luar. “Anak-anak yang ikut ke kebun dianggap bekerja, padahal mereka bermain atau menemani orangtuanya,” katanya. Fakta ini yang sering diabaikan dan dijadikan alat menyerang industri sawit.

Sementara itu, Baginda Siagian mengatakan Permentan No. 33 Tahun 2025 tentang ISPO adalah payung hukum baru yang mengikat seluruh perusahaan sawit. Ada 5 kriteria dan 36 indikator ketenagakerjaan sebagai syarat ISPO. Aktivitas perusahaan diukur kontribusinya terhadap 17 tujuan SDGs. “ISPO wajib memastikan tidak ada pekerja anak, penerapan kesetaraan gender, dan perlindungan tenaga kerja,” katanya. ■





GAPKI JAJAKI EKSPLORASI MATERIAL GENETIK SAWIT ZAMBIA

Industri sawit di Indonesia tidak bisa lepas dari material genetik dari Afrika.

Industri sawit di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari material genetik yang diintroduksi dari kawasan Afrika pada tahun 1848. Kawasan ini diyakini masih memiliki material genetik sawit yang menarik dieksplorasi untuk riset dan pengembangan sawit. Beberapa negara di Afrika seperti Kamerun, Angola, Ekuador, dan Tanzania telah menjalin kerjasama eksplorasi material genetik sawit dengan GAPKI. Yang terbaru dan sedang dijajaki adalah Zambia yang dikunjungi oleh delegasi Indonesia pada 1 Desember 2025.

Ketua Bidang Riset & Pengembangan GAPKI Dwi Asmono bersama Hermawan Yuli Rahmadi, Yurna Yenni mewakili GAPKI pada kunjungan ke Zambia Agriculture Research Institute (ZARI) di Mount Makulu, Chilanga, Zambia. Pertemuan dengan Direktur ZARI, Ndashe Kapulu dan tim riset ZARI ini didampingi oleh perwakilan Kedubes RI untuk Zimbabwe dan Zambia. Pada

pertemuan ini, Dwi Asmono menyampaikan perkembangan industri sawit di Indonesia yang

tidak bisa dilepaskan dari material genetik dari Afrika.

GAPKI mengajak Zambia menjadi negara berikutnya dalam kerjasama eksplorasi material genetik sawit. Sebagai timbal balik dan tanggung jawab moral, Zambia mendapat beberapa material elite Indonesia untuk diuji di Zambia. Selain timbal balik *material exchange*, Zambia juga mendapatkan share akses. Hal ini diharapkan dapat mengaktifkan kembali riset kelapa sawit yang pernah aktif di Zambia pada tahun 1950-an. Selain itu, produksi sawit di Zambia juga dapat meningkat.

Untuk eksplorasi material genetik dan prosedur pemeriksaan benih sebelum dikirim ke Indonesia, GAPKI mendapat penjelasan dari CABI (*Centre for Agriculture and Biosciences International*). CABI merupakan lembaga *non-profit* internasional yang berkantor pusat di Inggris yang telah menjalin kerjasama riset dengan ZARI. CABI di Lusaka akan

membantu proses pemeriksaan benih yang dilakukan di kantor pusat CABI di



Inggris. CABI menawarkan Indonesia masuk sebagai anggota seperti halnya Malaysia.

Direktur ZARI, Ndashe Kapulu merespon positif dan mendukung riset yang dilakukan GAPKI, termasuk rencana pengujian material hasil eksplorasi dan hasil pertukaran material elite dari Indonesia. Respon serupa juga disampaikan IDC (*Industrial Development Cooperation*) Zambia dalam pertemuan di kota Lusaka. IDC merupakan lembaga di bawah Kementerian Keuangan Zambia. IDC menyatakan tertarik dengan kemajuan industri sawit di Indonesia.

Dalam pertemuan ini, IDC mengenalkan ZAMPALM sebagai satu-satunya perusahaan yang memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 3.000. Namun produktivitasnya masih rendah jika dibandingkan Indonesia. IDC berharap dapat berkunjung ke Indonesia untuk mempelajari industri sawit dan pengembangannya. GAPKI dan ZARI sepakat untuk bekerjasama dalam bentuk pelatihan untuk perbaikan dan pengembangan industri kelapa sawit di Zambia. ■



TANZANIA PELAJARI PENGEMBANGAN SAWIT DARI INDONESIA

“Pemuliaan sawit Indonesia menghasilkan banyak material unggul yang penting bagi produksi.”

Indonesia menjadi barometer pengembangan industri sawit bagi Tanzania, salah satu negara di Afrika bagian timur. Untuk mempelajari industri sawit secara komprehensif, 13 orang yang mewakili Tanzania Agricultural Research Institute (TARI) dan Tanzania Plant Health and Pesticides Authority (TPHPA) mengikuti *Short Course of Oil Palm Plantation Management* yang diselenggarakan oleh GAPKI bersama Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) pada 12-24 Januari 2026 di Medan, Sumatera Utara.

Pembukaan pelatihan ini dihadiri oleh Ketua Konsorsium Ganoderma Indonesia GAPKI sekaligus Kepala SSPL PT Socfin Indonesia, Indra Syahputra. “Kolaborasi ini kerja sama yang sangat positif dan strategis, baik bagi Indonesia maupun Tanzania,” ujar Indra yang juga Komp. Best Management Practices GAPKI. Peserta pelatihan mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang pengelolaan perkebunan sawit, mulai dari pembibitan hingga budidaya di lapangan. Peserta juga meninjau langsung pengembangan material tanaman asal Tanzania yang telah dibudidayakan di Indonesia.

Selain sebagai pelatihan teknis,



kegiatan ini juga wadah pertukaran pengetahuan dan sumber daya genetik antarnegara. Salah satu wujud konkret kolaborasi adalah introduksi tiga spesies serangga penyerbuk *Elaeidobius* asal Tanzania yang memiliki peran strategis dalam mendukung produktivitas sawit nasional. “Pemuliaan sawit Indonesia menghasilkan banyak material unggul yang penting bagi produksi,” katanya.

Kerjasama ini sangat penting bagi Tanzania yang berada pada tahap awal pengembangan industri sawit. Kondisi ini membuka peluang besar bagi penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui transfer pengetahuan dan pengalaman Indonesia membangun industri sawit secara terintegrasi. “Peserta dapat melihat langsung industri sawit Indonesia tumbuh melalui praktik yang

dijalankan anggota GAPKI,” katanya.

Selama program berlangsung, perwakilan TARI dan TPHPA mendapat pembekalan materi komprehensif serta terlibat langsung dalam kegiatan di perkebunan dan fasilitas riset. Pendekatan ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan teknologi, riset, dan manajemen perkebunan kelapa sawit.

Program ini ditargetkan meningkatkan kompetensi teknis peserta sekaligus memperkuat kerja sama riset dan pengembangan sawit antara Indonesia dan Tanzania. GAPKI akan berkomitmen penuh mendorong kolaborasi internasional yang saling menguntungkan. “GAPKI siap bekerja bersama dan mendukung pengembangan industri sawit Tanzania ke depan,” katanya. ■



GAPKI PROMOSIKAN TEMPAT KERJA TANPA KEKERASAN DAN PELECEHAN

Industri kelapa sawit harus menjadi motor serta contoh bagi industri lainnya.

Komitmen GAPKI dalam kampanye tempat kerja yang aman dan terbebas dari kekerasan serta pelecehan seksual terus dilakukan secara konsisten. Semangat anti kekerasan dan pelecehan di tempat kerja salah satunya diwujudkan melalui kampanye *global 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence*. “Inisiatif dan gerakan yang dilakukan oleh GAPKI sudah berlangsung sejak tahun 2021,” kata Ketua Bidang Pengembangan SDM GAPKI, Sumarjono Saragih dalam *Leaders’ Gathering* yang dihadiri 50 orang pemimpin bisnis di Jakarta pada 11 Desember 2025.

Leaders’ Gathering diadakan oleh ILO dan Koalisi Bisnis untuk Pemberdayaan Perempuan (IBCWE) dengan tema *Membangun Tempat Kerja yang Terbebas dari Kekerasan dan Pelecehan* berbarengan dengan kampanye global 16 Hari Aksi Melawan Kekerasan Berbasis Gender. Dalam kegiatan ini, GAPKI diminta untuk membagikan inisiatif dan gerakan yang telah dilakukan di sektor perkebunan kelapa sawit. Apalagi GAPKI telah menerbitkan



buku Panduan Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit pada tahun 2021.

Menurut Sumarjono Saragih, gerakan ini mendorong pembentukan Komite Jender dan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di tempat kerja. Keberadaan RP3 bertujuan memastikan tempat kerja yang aman, tanpa kekerasan dan pelecehan. Tempat kerja yang kondusif ini harus menjadi bagian *inheren* dalam proses bisnis. Selain merupakan peraturan nasional, tempat kerja yang aman juga menjadi standar internasional dan standar sertifikasi pasar global. “Pilihannya hanya satu, semua korporasi harus patuh,” katanya.

Memastikan tempat kerja yang aman sangat penting karena industri sawit sering menjadi sorotan banyak kalangan. Kekeliruan sedikit saja bisa menjadi berita besar dan peluang bagi

yang tidak senang dengan industri ini untuk melakukan kampanye negatif. Patuh terhadap peraturan saja dinilai tidak cukup karena publik menuntut lebih (*beyond*). Industri kelapa sawit harus menjadi motor serta contoh bagi industri lainnya. “Karena itu perlindungan pekerja perempuan menjadi gerakan bersama,” katanya.

Sumarjono Saragih mengatakan GAPKI terus melakukan sosialisasi, promosi, dan workshop di berbagai daerah untuk menggelorakan semangat anti kekerasan dan pelecehan terhadap pekerja perempuan. “Kegiatan ini selalu melibatkan semua perusahaan anggota GAPKI, para petani, pemerintah setempat dan lembaga swadaya masyarakat,” katanya. Hal ini tidak lepas dari besarnya jumlah pekerja perempuan yang diperkirakan mencapai 9 juta orang di sektor perkebunan sawit. ■





MENINGKATKAN KAPASITAS K3 DI SEKTOR SAWIT

ILO RealGains menekankan pentingnya K3 berperspektif gender.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bukan program instan untuk menjamin ketenangan dan kenyamanan pekerja. Program ini menuntut konsistensi implementasi, kesinambungan kegiatan, dan sosialisasi tiada henti. Apalagi tantangan kerja bersifat dinamis dan berubah setiap saat. Karena itu, JAGA SAWITAN mengadakan *Lokakarya K3 dan Sosialisasi Informasi Ketenagakerjaan Nasional di Sektor Kelapa Sawit* dalam rapat tahunan yang diselenggarakan di Jakarta pada 3 Desember 2025.

Rapat tahunan sekaligus koordinasi ini dihadiri oleh pengurus Pusat GAPKI, Tim Forum K3 GAPKI dan perwakilan GAPKI Kalimantan Selatan, GAPKI Kalimantan Barat, GAPKI Kalimantan Tengah, serta perwakilan JAPBUSI (Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sawit Indonesia). “Kegiatan ini mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman, terutama bagi pekerja perempuan,” kata Sumarjono Saragih, Ketua Bidang Pengembangan SDM GAPKI sekaligus Presidensi JAGA SAWITAN.

Menurut Sumarjono Saragih, kapasitas sektor sawit dalam menerapkan K3 harus diperkuat karena tantangan industri ini cukup besar. Peningkatan kapasitas di sektor sawit diarahkan untuk pekerja perempuan yang selama ini menjadi salah satu *concern* industri kelapa



sawit nasional. Penguatan K3 untuk pekerja perempuan juga menjadi program kolaborasi JAGA SAWITAN dengan ILO Jakarta melalui proyek RealGains. “Proyek *RealGains* memiliki tiga sasaran,” katanya.

Pertama, akses pekerja perempuan terhadap lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas diskriminasi. Kedua, penguatan kerangka nasional untuk penghapusan pekerja anak. Ketiga, peningkatan perlindungan pekerja melalui penguatan kapasitas dan mekanisme penyelesaian perselisihan serta pemenuhan FPRW (*Fundamental Principles and Rights at Work*) atau Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.

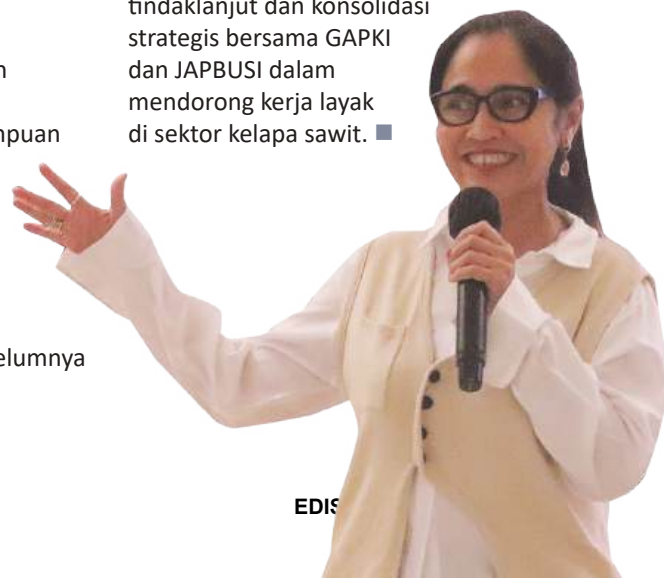
Sumarjono Saragih mengatakan sasaran pertama *ILO RealGains* menekankan pentingnya K3 berperspektif gender yang mempertimbangkan risiko dan kebutuhan keselamatan yang berbeda antara pekerja perempuan dan laki-laki. Pedoman K3 sektor kelapa sawit awalnya dikembangkan oleh ILO dan GAPKI melalui *Palm Oil Project*. Proyek RealGains melanjutkan pengembangan pedoman yang dirancang sebelumnya



secara strategis melalui mekanisme kepemilikan dan implementasi di bawah JAGA SAWITAN.

Pentingnya penguatan kapasitas K3 di sektor sawit juga disampaikan oleh Yuka Ujita selaku Occupational Safety and Health Senior Specialist ILO Bangkok. Dinamika dan perkembangan yang terjadi di industri sawit, terutama tuntutan masyarakat global menjadikan penguatan kapasitas K3 sangat penting. Apalagi ruang untuk mengembangkan penerapan K3 di sektor sawit masih terbuka demi tercapainya perlindungan pekerja secara maksimal.

Rapat tahunan untuk merancang program kerja tahun 2026 ini juga membahas program kerja prioritas tahun 2026. Termasuk di dalamnya tindakan lanjut dan konsolidasi strategis bersama GAPKI dan JAPBUSI dalam mendorong kerja layak di sektor kelapa sawit. ■



“Saat ini, budi daya sawit sudah berada dalam sistem keberlanjutan,” katanya.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono

Karena itu, dalam pengembangan industri sawit di masa sekarang dilakukan dalam sistem keberlanjutan sehingga dampak ekonomi sawit juga memberikan dampak sosial, lingkungan secara seimbang proporsional dan seimbang. “Saat ini, budi daya sawit sudah berada dalam sistem keberlanjutan,” katanya. ■

GAPKI KALIMANTAN TENGAH TERIMA ANUGERAH PEDULI PERS

Penyebaran informasi yang berimbang tentang sawit sangat penting sebagai edukasi.

GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menerima Penghargaan Peduli Pers dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat atas komitmennya dalam mendukung kemitraan yang sehat antara industri dan pers terutama dalam penyebaran informasi yang berimbang tentang komoditas kelapa sawit. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua PWI Pusat Akhmad Munir kepada Ketua GAPKI Kalimantan Tengah Au Risky Djaya dalam Konferensi Daerah (Konferda) PWI Kalimantan Tengah di Hotel Altrue, Palangkaraya, 29 Desember 2025.

Sekretaris GAPKI Kalimantan Tengah Rawing Rambang menyampaikan terima kasih atas penghargaan dan atensi dari dunia pers terhadap industri kelapa sawit, terutama di daerah Kalimantan Tengah. Penyebaran informasi yang berimbang tentang sawit sangat penting sebagai edukasi kepada masyarakat dalam memahami komoditas sawit. Selain itu, pers juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan industri sawit sebagai bagian dari kontrol sosial.

"Kami harapkan kerjasama dan sinergi GAPKI Kalimantan Tengah dan PWI semakin kuat ke depan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif," kata Rawing Rambang. Sinergi yang positif menjadi bekal berharga dalam memajukan perekonomian daerah sehingga kesejahteraan masyarakat semakin membaik. "Kerjasama yang kita lakukan harus memberi dampak positif bagi industri, pemerintah daerah, dan masyarakat," katanya.

Ketua PWI Pusat Akhmad Munir



mengatakan sinergi antara industri dan pers dilaksanakan secara proporsional dengan memperkuat peran masing-masing. Sinergi dengan industri juga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme media dengan berpegang teguh pada kaidah dan etika jurnalistik. "Tantangan pers ke depan adalah menjaga marwah, integritas dan profesionalisme," katanya. Sinergi dengan berbagai elemen diharapkan memberikan dampak positif seperti rasa aman bagi masyarakat.

Dalam Konferda PWI Kalimantan Tengah ini, PWI Pusat juga memberikan penghargaan kepada Agustiari Sabran sebagai pribadi dan Gubernur Kalimantan Tengah. Apresiasi yang diberikan adalah penganugerahan Anggota Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia. Sebagai gubernur dan pribadi, Agustiari Sabran dinilai

telah menunjukkan sikap konsisten dalam menjaga integrasi nasional serta mendukung pembangunan Indonesia, termasuk pembangunan pers nasional.

Menurut Akhmad Munir, Gubernur Agustiari Sabran aktif membina hubungan fungsional dengan wartawan dan praktisi pers serta berjasa membantu berbagai program kegiatan PWI, khususnya di Kalimantan Tengah. "Gubernur Agustiari Sabran memahami pentingnya kolaborasi dengan pers dalam konteks pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan perekonomian daerah," katanya.

Salah satu sinergi dengan pers yang sudah berjalan antara lain dukungan program sertifikasi kompetensi wartawan yang telah menjangkau 387 orang wartawan, terutama anggota PWI Kalimantan Tengah. ■

PARTISIPASI GAPKI DALAM PANEN RAYA PROGRAM SWASEMBADA PANGAN

Presiden Prabowo mengumumkan Indonesia berhasil mewujudkan swasembada pangan.

Sebagai asosiasi pengusaha sawit, GAPKI berpartisipasi aktif dalam swasembada pangan sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Partisipasi ini diwujudkan dalam program tumpang sari tanaman pangan di kebun sawit anggota GAPKI hingga menghadiri tanam padi dan jagung serta panen raya seperti di Kertamukti, Cilebar, Karawang, Jawa Barat pada 7 Januari 2026. Acara ini oleh Presiden Prabowo dan undangan yang mencapai 5.000 orang. GAPKI diwakili oleh Sekretaris Jenderal M. Hadi Sugeng dan Ketua Bidang Perkebunan R. Aziz Hidayat.

Pada panen raya ini, Presiden Prabowo mengumumkan Indonesia berhasil mewujudkan swasembada pangan sebagai target pemerintahannya. Sukses ini tidak lepas dari dukungan modernisasi, mekanisasi, dan pemanfaatan teknologi. Benih yang digunakan yakni Inpari 32 yang memiliki potensi hasil panen 8,42 ton per hektar. Meski demikian, Presiden berharap ada teknologi yang menghasilkan varietas unggul dengan hasil panen 15 ton per hektar.

Untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah mendorong pemanfaatan lahan tidak produktif dengan melibatkan TNI dan Polri serta pengusaha perkebunan. Komoditas sawit tidak luput dari program ini melalui program tumpang sari. Tanaman pangan yang dipilih antara lain jagung dan padi gogo yang cocok di lahan kering. Tumpang sari dikembangkan di kebun yang sedang menjalani peremajaan (replanting). Ini adalah strategi optimalisasi lahan terutama pada masa Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).

Integrasi sawit dan padi gogo

dijalankan oleh GAPKI melalui kemitraan petani plasma dan perusahaan sawit anggota GAPKI. Program ini mulai dikembangkan di kebun sawit milik KUD Gajah Mada, mitra binaan PT Tapisan Nadenggan di Desa Telagasari, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan sejak April 2024. Padi gogo ditanam di sela-sela jalur tanaman sawit selama kanopi daun pohon sawit belum menutup lahan. Program ini bersamaan dengan PSR yang melibatkan 347 pekebun dengan luasan 720,6 hektar.

Dalam hitungan guru besar agronomi IPB University, Prof. Suwarso, setiap satu hektar lahan untuk PSR terdapat 2.500-3000 meter persegi area yang bisa ditanami padi gogo. Produksi padi gogo di lahan PSR diperkirakan bisa mencapai 5 kali panen selama dua setengah tahun sampai tanaman sawit belajar berbuah.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan modernisasi pertanian menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan. Penguatan mekanisasi, penyediaan sarana produksi, serta pendampingan petani terus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani. "Kita harus mendorong pertanian kita berbasis inovasi dan teknologi. Dengan teknologi, produktivitas meningkat, indeks pertanaman naik, biaya produksi turun, dan kesejahteraan petani semakin membaik," katanya.

Mentan Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun pertanian Indonesia yang modern, efisien, dan berdaya saing, sebagai fondasi kuat menjaga kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. ■



SUMATERA SELATAN TINDAK TEGAS PENCURIAN TBS

"Kalau tidak dibarengi dengan pencegahan oleh GAPKI atau pemilik perkebunan, ini tidak akan maksimal."

Pencurian tandan buah segar yang terus terjadi di wilayah Sumatera Selatan mendapatkan perhatian serius Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Gubernur meminta penanganan pencurian TBS difokuskan pada pencegahan dan penyelesaian legalitas lahan. Penindakan tegas sangat penting karena pencurian TBS bertransformasi menjadi sindikat semi-modern. Karena itu, pencegahan tidak hanya oleh aparat penegak hukum, namun juga oleh GAPKI sebagai asosiasi pengusaha kelapa sawit.

"Kalau tidak dibarengi dengan pencegahan oleh GAPKI atau pemilik perkebunan, ini tidak akan maksimal," kata Herman Deru dalam rapat koordinasi mengatasi gangguan usaha perkebunan kelapa sawit di Palembang pada 9 Desember 2025. Rapat ini dihadiri oleh Polda Sumsel, Kejaksaan Tinggi Sumsel, dan GAPKI Cabang Sumatera Selatan. Berdasarkan laporan Polda Sumsel, terdapat 31 pabrik CPO tanpa memiliki kebun sendiri atau pabrik brondol. Meski berizin, pabrik ini tidak punya jaminan pasokan bahan baku.

Menurut Gubernur, apabila diasumsikan kapasitas rata-rata satu pabrik kelapa sawit tanpa kebun

ini 60 ton per hari, maka 31 PKS membutuhkan pasokan hingga hampir 2.000 ton TBS per hari. Pasokan sebanyak ini membuka peluang pasokan dari tindakan ilegal. "Volume sebesar ini, kuat diindikasikan berasal dari tindakan melawan hukum," katanya. Pemprov akan memonitor sumber TBS pada PKS tanpa kebun ini. Pemprov juga akan mengamati pergerakan 4.000 ton minyak ilegal per hari hasil Rantai Alternatif Minyak (RAM).

Selain mendorong partisipasi aktif GAPKI, Gubernur juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel memiliki wadah pelaporan, bahkan aplikasi Si Tanjak untuk memonitor distribusi, kegunaan, dan volume CSR. Anggota GAPKI Sumsel diminta memanfaatkan Si Tanjak sebagai salah satu sarana pencegahan pencurian TBS. Sebab, koordinasi CSR yang tepat sasaran diharapkan menutup celah konflik sosial dan mengurangi minat masyarakat untuk terlibat dalam pencurian.

Gubernur juga meminta GAPKI lebih mengintensifkan koordinasi antar perusahaan serta memastikan setiap perusahaan menjalankan kewajiban hukum dan sosial mereka dengan baik. "Kami berharap



perkebunan di Sumsel menjadi mitra yang proaktif dalam menjaga keberlanjutan usaha ini, termasuk mengatasi masalah pencurian TBS," ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andi Rian mengungkapkan pencurian TBS di wilayahnya menunjukkan tren peningkatan signifikan. Saat ini ada sekitar 277 perusahaan sawit di wilayah tersebut. Sejumlah masalah mendasar yang berkontribusi pada persoalan ini antara lain lemahnya legalitas lahan dan konflik kepemilikan dengan masyarakat.

Gubernur meminta Dinas Perkebunan provinsi maupun kabupaten/kota menyosialisasikan dan mempermudah proses pendaftaran tanah. Program seperti PRONA dan Proda (Program Daerah) dapat mempermudah pendaftaran tanah dan pengurusan sertifikat tanah. "Jangan sampai masyarakat merasa *hopeless* karena mengurus sertifikat tanah yang dianggap berbelit," katanya. ■





BORNEO FORUM 2026

GAPKI KALIMANTAN TIMUR

Resilience, Innovation, and Transformation :
Empowering The Palm Oil Industry Beyond Sustainability

KALIMANTAN TIMUR
BALIKPAPAN | **5-8** AGUSTUS
2026

KONTEN ACARA :

- Talk Show
- EXPO UMKM
- JOB FAIR
- Golf Tournament
- Pameran Industri & Produk Kelapa Sawit
- GAPKI Run



Scan Me! For More Information

hosted by
GAPKI Cabang Kalimantan Timur

Supported by
GAPKI Cabang Kalimantan Tengah - Kalimantan Barat
Kalimantan Utara - Kalimantan Selatan

Informasi :



Anggun 081258000084
Purwanto 089692308743



ANDALAS FORUM V TAHUN 2026



**SAWIT INDONESIA:
SINERGI UNTUK TATA KELOLA, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN BERKELANJUTAN**

 **16-17** April 2026

 **Ballroom Hotel Aryaduta Palembang**

SEMINAR & PAMERAN



PINDAI UNTUK
INFO LENGKAP



SCAN DI SINI

Host By :
GAPKI SUMSEL

Sekretariat GAPKI Cabang Sumsel Jl. Brigjend Hasan Kasim
Komplek Jaya Raya Garden , No. C-9 Palembang

Supported:

GAPKI Cabang Aceh – Sumatera Utara – Riau
Sumatera Barat – Bengkulu – Jambi – Bangka Belitung

 **Contact Person:**
- Purna Irawan (085669544771)
- A. Tauhid (081214783568)

 **gapki_sumsel@yahoo.com**

 **gapkisumsel**